

# SKRIPSI

## ANALISIS *VALUE FOR MONEY* PADA KINERJA KEUANGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN KAMPAR

*Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk mendapatkan gelar  
Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau*



Oleh:

**INDRI ADINDA MEITRI**  
185310273

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2022**



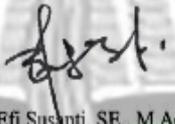
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan  
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Indri Adinda Meitri  
NPM : 185310273  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi S1  
Judul Skripsi : Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Badan  
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar

Disahkan Oleh:

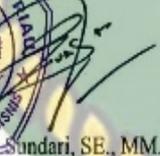
PEMBIMBING

  
Efi Susanti, SE., M.Acc

Mengetahui:

DEKAN



  
Drs. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

KETUA PRODI



Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS *VALUE FOR MONEY* PADA KINERJA KEUANGAN BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN KAMPAR**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Pekanbaru, 28 Maret 2022

Yang memberikan pernyataan,



Indri Adinda Meitri  
NPM:185310273



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax: +62 761 674834 Email : info@uir.ac.id Website : www.eco.uir.ac.id

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau  
Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : INDRI ADINDA MEITRI  
NPM : 185310273  
Program Studi : Akuntansi S1  
Judul Skripsi : ANALISIS *VALUE FOR MONEY* PADA KINERJA KEUANGAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)  
KABUPATEN KAMPAR

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30 % yaitu 16 % pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*, Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 28 Maret 2022

Ketua Program Studi Akuntansi



Siska, SE., M.Si., Ak., CA

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor: 1017/Kpts/FE-UIR/2021**  
**TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1**  
**DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Membaca : Surat Penetapan Ketua Program Studi Akuntansi S1 tanggal, 2021-10-04 Tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Menimbang : Bahwa dalam membantu Mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik, perlu ditunjuk dosen pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  4. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  5. SK. Dewan Pimpinan YLPI Riau Nomor : 106/Kpts. A/YLPI/VI/2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Periode. 2017-2021
  6. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.
  7. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing tugas akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau  
a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Mengangkat Saudara yang tersebut namanya dibawah ini sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Keterangan
1.	Efi Susanti, SE., M.Acc.	Asisten Ahli	Pembimbing

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah :
- N a m a : Indri Adinda Meitri  
N P M : 185310273  
Jurusan/Jenjang Pended. : Akuntansi S1  
Judul Skripsi : Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar
3. Tugas Pembimbing berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau.
4. Dalam pelaksana bimbingan supaya memperhatikan Usul dan Saran dari Forum Seminar Proposal, kepada Dosen pembimbing diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.
- Kutipan : disampaikan kepada Ybs untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di: Pekanbaru  
Pada Tanggal: 07 Oktober 2021  
Dekan

  
**Dr. Eva Sundari, SE., MM, C.R.B.C.**

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Kepada Yth. Ketua Program Studi EP, Manajemen dan Akuntansi
2. Arsip File : SK.Dekan Kml Haj

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL**

Nama : Indri Adinda Meitri  
NPM : 185310273  
Judul Proposal : Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar.  
Pembimbing : 1. Efi Susanti, SE., M.Acc  
Hari/Tanggal Seminar : Rabu 29 Desember 2021

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

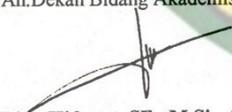
1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan \*)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali \*)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki \*)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki \*)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas \*)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang \*)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas \*)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas \*)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas \*)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas \*)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas \*)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian \*)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat \*)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali \*)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Efi Susanti, SE., M.Acc	Ketua	1. 
2.	Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA	Anggota	2. 
3.	Lintang Nur Agya, SE., M.Acc., Ak	Anggota	3. 

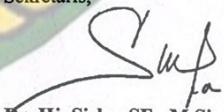
\*Coret yang tidak perlu

Mengetahui  
An.Dekan Bidang Akademis

  
Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA



Pekanbaru, 29 Desember 2021  
Sekretaris,

  
Br. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: [www.uir.ac.id](http://www.uir.ac.id) Email: [Info@uir.ac.id](mailto:Info@uir.ac.id)

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR  
SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

NPM : 185310273  
Nama Mahasiswa : INDRI ADINDA MEITRI  
Dosen Pembimbing : EFI SUSANTISE, M.Acc  
Program Studi : AKUNTANSI S1  
Judul Tugas Akhir : Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar  
Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Value For Money Analysis on Financial Performance Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar  
Lembar Ke : 1

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	Selasa, 9 November 2021	Teknik penulisan dan latar belakang masalah	Sudah diperbaiki	efs
2	Selasa, 23 November 2021	Kemukakan permasalahan terkait outcome yang dirasakan masyarakat	Sudah diperbaiki	efs
3	Selasa, 30 November	Teori ditambah, sumber data dipisah, tabel bab 1 dipindahkan ke lampiran, dan rapikan penulisan	Sudah diperbaiki	efs
4	Senin, 6 Desember 2021	Proposal disetujui untuk diseminarkan	Sudah diperbaiki	efs
5	Selasa, 8 Februari 2022	Rapikan penulisan, perbaiki kalimat pembahasan dan typo	Sudah diperbaiki	efs
6	Rabu, 16 Februari 2022	Perbaiki abstrak menjadi 3 paragraf yang berisikan tujuan, metode, dan hasil penelitian, masukkan tabel perhitungan yang berada dalam pembahasan ke hasil penelitian, jelaskan kegiatan apa yang mencapai persentase terkecil dan terbesar pada tiap elemen VFM	Sudah diperbaiki	efs
7	Senin, 7 Maret 2022	Abstrak tidak ada saran, sumber data perbaiki, pembahasan dipisah tiap masing-masing elemen VFM, hindari pengulangan kata dalam pembahasan	Sudah diperbaiki	efs
8	Senin, 14 Maret 2022	Skripsi disetujui untuk diseminarkan	Sudah diperbaiki	efs

Pekanbaru, 28 Maret 2022  
Ketua Prodi



MTG1MZEWMJCZ

(Dr. Hj. SISKA SE., M.Si., Ak., CA)

**Catatan :**

- Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
- Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
- Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
- Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
- Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopinya dilampirkan pada skripsi.
- Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor : 336 / Kpts/FE-UIR/2022**  
**TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**Menimbang** : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau dilaksanakan ujian skripsi / oral comprehensive sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji  
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.

**Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen  
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.  
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.  
7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :  
a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangun  
b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen  
c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1  
Irma Dona Cahyati d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/TV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

N a m a : Indri Adinda Meitri  
N P M : 185310273  
Program Studi : Akuntansi S1  
Judul skripsi : Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar.

2. Penguji ujian skripsi/oral comprehensive mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	Efi Susanti, SE., M.Acc	Assisten Ahli, C/b	Materi	Ketua
2	H. Burhanuddin, SE., M.Si	Lektor, C/c	Sistematika	Sekretaris
3	Nina Nursida, SE., M.Acc	Assisten Ahli, C/b	Lektor Kepala, D/a	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Assisten Ahli, C/b	Anggota
6	Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak.CA	Assisten Ahli, C/b	-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.

4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 23 Maret 2022  
Dekan



**Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC**

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Indri Adinda Meitri  
NPM : 185310273  
Jurusan : Akuntansi / S1  
Judul Skripsi : Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar.  
Hari/Tanggal : Rabu 23 Maret 2022  
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Efi Susanti, SE., M.Acc		

Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	H. Burhanuddin, SE., M.Si		
2	Nina Nursida, SE., M.Acc		

Hasil Seminar : \*)

1. Lulus ( Total Nilai )
2. Lulus dengan perbaikan ( Total Nilai 86,5 )
3. Tidak Lulus ( Total Nilai )

Mengetahui  
An.Dekan

  
Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA  
Wakil Dekan I



Pekanbaru, 23 Maret 2022  
Ketua Prodi

  
Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

\*) Coret yang tidak perlu

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpovan Pekanbaru Telp 647647

**BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau No: 336/KPTS/FE-UIR/2022, Tanggal 22 Maret 2022, Maka pada Hari Rabu 23 Maret 2022 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau pada Program Studi Akuntansi S1 Tahun Akademis 2021/2022

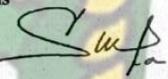
- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Nama                 | : Indri Adinda Meitri   |
| 2. NPM                  | : 185310273   |
| 3. Program Studi        | : Akuntansi S1  |
| 4. Judul skripsi        | : Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar. |
| 5. Tanggal ujian        | : 23 Maret 2022   |
| 6. Waktu ujian          | : 60 menit.   |
| 7. Tempat ujian         | : Ruang sidang meja hijau FEB UIR   |
| 8. Lulus Yudicium/Nilai | : <b>Lulus (A) 86,25</b>  |
| 9. Keterangan lain      | : Aman dan lancar.  |

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

  
**Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA**  
Wakil Dekan Bidang Akademis

**Sekretaris**

  
**Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA**  
Ketua Prodi Akuntansi S1

**Dosen penguji :**

1. Efi Susanti, SE., M.Acc
2. H. Burhanuddin, SE., M.Si
3. Nina Nursida, SE., M.Acc

 (.....)  
 (.....)  
 (.....)

**Notulen**

1. Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak., CA., ACPA

 (.....)

Pekanbaru, 23 Maret 2022

Mengetahui  
Dekan,



  
**Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC**



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 674674  
Fax: (0761) 6748834 PEKANBARU – 28284

**TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Indri Adinda Meitri

NPM : 185310273

Program Studi : Akuntansi S1

Judul Penelitian : Analisis *Value For Money* Pada Kinerja Keuangan Badan  
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten  
Kampar

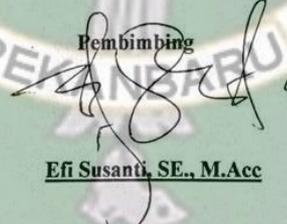
Disetujui Oleh

Tim Penguji

1. Burhanuddin, SE., M.Si
2. Nina Nursida, SE., M.Acc

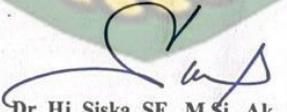
Tanda Tangan

(  )  
(  )

  
Pembimbing

Efi Susanti, SE., M.Acc

Mengetahui:  
Ketua Program Studi Akuntansi S1

  
Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Kabupaten Kampar melalui prinsip *value for money*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Data yang diperoleh berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar tahun 2019 dan 2020.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019 perhitungan ekonomis dengan nilai rasio sebesar 96,64% dikategorikan ekonomis, perhitungan efisiensi dengan nilai rasio sebesar 103,48% dikatakan efisien, dan perhitungan efektivitas dengan nilai rasio sebesar 99,52% dikategorikan tidak efektivitas. Pada tahun 2020 perhitungan ekonomis dengan nilai rasio sebesar 91,44% dikategorikan ekonomis, perhitungan efisien dengan nilai rasio sebesar 103,99% dikategorikan efisien, dan perhitungan efektivitas dengan nilai rasio sebesar 89,01% dikategorikan tidak efektivitas. Dengan demikian kinerja Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Kabupaten Kampar pada tahun 2019 dan 2020 yang ditinjau dari elemen ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E) belum memenuhi prinsip *value for money*.

**Kata kunci :** ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, *value for money*, kinerja

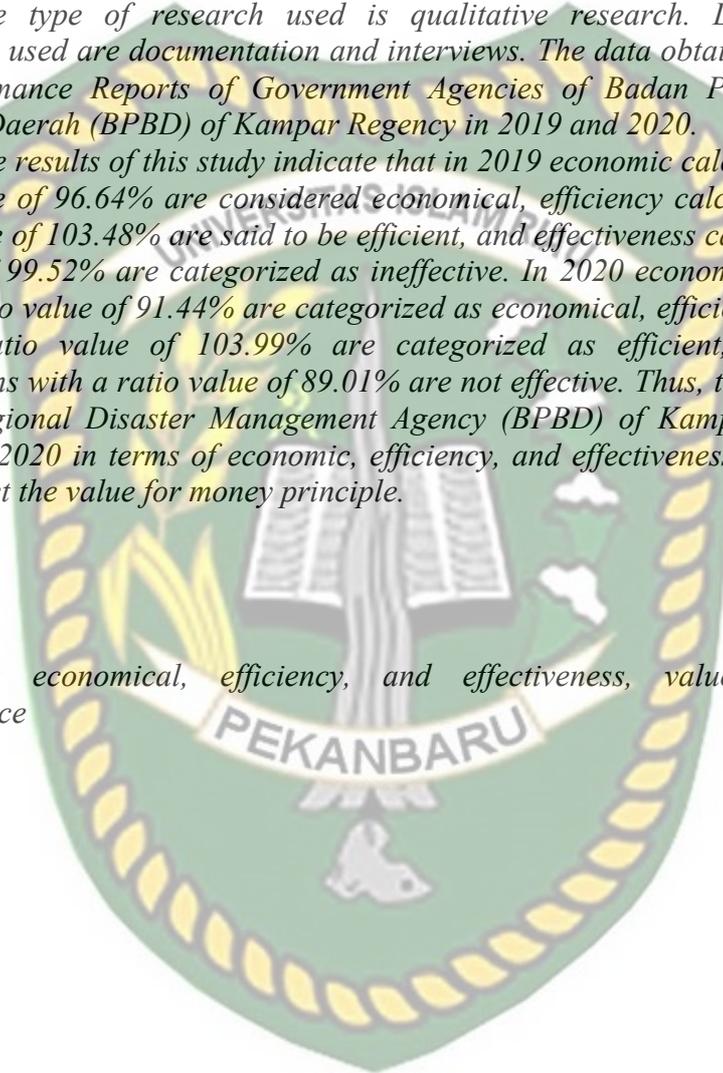
## **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the performance accountability of Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar through the principle of value for money.*

*The type of research used is qualitative research. Data collection techniques used are documentation and interviews. The data obtained in the form of Performance Reports of Government Agencies of Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) of Kampar Regency in 2019 and 2020.*

*The results of this study indicate that in 2019 economic calculations with a ratio value of 96.64% are considered economical, efficiency calculations with a ratio value of 103.48% are said to be efficient, and effectiveness calculations with a value of 99.52% are categorized as ineffective. In 2020 economic calculations with a ratio value of 91.44% are categorized as economical, efficient calculations with a ratio value of 103.99% are categorized as efficient, and effective calculations with a ratio value of 89.01% are not effective. Thus, the performance of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Kampar Regency in 2019 and 2020 in terms of economic, efficiency, and effectiveness (3E) elements has not met the value for money principle.*

**Keywords:** *economical, efficiency, and effectiveness, value for money, performance*



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Penulis mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subbhanahuwata'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Analisis Value for Money pada Kinerja Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar**" sebagai pemenuhan syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

Penulis mempercayai bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas izin dan ketetapan Allah Subbhanahuwata'ala, namun dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari orang-orang disekitar penulis yang begitu banyak memberi bantuan serta dukungannya. Maka dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua, Ayahanda Ahmad Syarifuddin dan Ibunda R.A Ermawati serta abang dan kakak yang telah memberi kasih sayang, motivasi, serta semangat dan bantuan baik moril dan materi yang selamanya ini telah diberikan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
3. Ibu DR. Eva Sundari, SE., MM., CRBC selaku Dekan Fakultas Ekonomis dan Bisnis Universitas Islam Riau.

4. Ibu Dr. Siska, SE., Msi., AK., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
5. Ibu Nina Nursida, SE.,M.Acc., selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
6. Ibu Efi Susanti , SE., M.Acc selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih atas segala bimbingan, kritikan, masukan, motivasi, dan saran yang penulis dapatkan dari selama proses penyusunan skripsi. Dengan segala kesibukan Ibu bersedia untuk membimbing dan menuntun penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih dan mohon maaf jika ada kesalahan yang penulis telah lakukan.
7. Ibu Eny Wahyuningsih, Dra, M.si., Ak.CA selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuannya kepada penulis selama proses perkuliahan. Semoga ilmu yang penulis terima dapat berguna dikemudian hari dan selalu diberkahi oleh Allah Subbhanahuwata'ala.
9. Bapak dan Ibu staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu dalam penulisan ini.
10. Kepada Sekretaris Badan Penanggulangan bencana Daerah (BPBD) kabupaten Kampar dan seluruh staf yang telah membantu dan memberikan izin kepada saya dalam memberikan data dan keterangan terkait penelitian ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.

11. Seluruh teman-teman saya yang bersedia saling berbagi ilmu, pengetahuan, kebersamaan, semangat dan dorongan kepada penulis selama masa perkuliahan khususnya jurusan Akuntansi S1 angkatan 2018 kelas B terimakasih atas kerjasamanya.

12. Dan seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat, doa, dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Hal ini tentu tidak terlepas dari keterbatasan dan kesempurnaan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna menyempurnakan pengetahuan penulis.

Akhir kata penulis berharap Allah Subbhanahuwata'ala memberikan balasan yang berlipat ganda atas dukungan dan bantuan yang diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Pekanbaru, 29 Desember 2021

Penulis,

Indri Adinda Meitri

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI....	
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL.....	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	
SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI.....	
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN.....	
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	
PERSETUJUAN PERBAIKAN.....	
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS</b>	
2.1 Telaah Pustaka .....	10
2.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	10
2.1.1.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .	10
2.1.1.2 Prinsip Penyusunan Anggaran Pendapatn dan Belanja Daerah ...	11
2.1.2 Konsep Kinerja Keuangan .....	12
2.1.2.1 Pengertian Kinerja dan Pengukuran Kinerja.....	12
2.1.2.2 Tujuan Pengukuran Kinerja .....	13
2.1.2.3 Manfaat Pengukuran Kinerja .....	14

2.1.2.4	Pengertian Indikator Kinerja .....	15
2.1.3	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	18
2.1.3.1	Pengertian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .....	18
2.1.3.2	Prinsip Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemrintah.....	19
2.1.3.3	Format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .....	19
2.1.4	<i>Value For Money</i> .....	20
2.1.4.1	Pengertian Value For Money .....	21
2.1.4.2	Indikator Value For Money.....	22
2.1.4.3	Manfaat Implementasi Konsep Value For Money .....	24
2.1.4.4	Penelitian Terdahulu .....	25
2.2	Hipotesis .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
3.1	Desain Penelitian .....	28
3.2	Objek Penelitian.....	28
3.3	Definisi Variabel Penelitian.....	28
3.3.1	<i>Value For Money</i> .....	28
3.3.1.1	Ekonomis .....	29
3.3.1.2	Efisiensi.....	30
3.3.1.3	Efektivitas .....	31
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	32
3.4.1	Jenis data .....	32
3.4.2	Sumber Data.....	32
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.6	Teknik Analisa Data .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	35
4.1.1	Kedudukan .....	35
4.1.2	Tugas Pokok dan Fungsi.....	36
4.1.3	Struktur Organisasi .....	37

4.1.4 Visi dan Misi BPBD Kampar .....	42
4.1.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2019-2020.....	42
4.2 Hasil Penelitian .....	47
4.2.1 Ekonomis .....	48
4.2.2 Efisiensi .....	55
4.2.3 Efektivitas .....	62
4.3.1 Ekonomis .....	67
4.3.2 Efisiensi .....	68
4.3.3 Efektivitas .....	69
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Simpulan .....	72
5.2 Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Capaian fisik Program Bidang Kedaruratan dan Logistik .....	4
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 4. 1 Daftar Susunan Kepegawaian BPBD Per Desember Tahun 2019.....	37
Tabel 4. 2 Daftar Susunan Kepegawaian BPBD Per Desember Tahun 2020.....	38
Tabel 4. 3 Pejabat Struktural Per Desember Tahun 2019 .....	39
Tabel 4. 4 Pejabat Struktural Per Desember 2020 .....	39
Tabel 4. 5 Jumlah Jabatan Fungsional Umum Yang Ditugaskan BPBD Per Desember Tahun 2019.....	39
Tabel 4. 6 Jumlah Jabatan Fungsional Umum Yang Ditugaskan BPBD Per Desember Tahun 2020 .....	40
Tabel 4. 7 Perjanjian Indikator Kinerja BPBD Kampar Tahun 2019.....	41
Tabel 4. 8 Perjanjian Indikator Kinerja BPBD Kampar Tahun 2020 .....	43
Tabel 4. 9 Perjanjian Program BPBD Kampar Tahun 2019.....	44
Tabel 4. 10 Perjanjian Program BPBD Kampar Tahun 2020 .....	45
Tabel 4. 11 Perhitungan Ekonomis BPBD Kampar Tahun 2019 .....	47
Tabel 4. 12 Perhitungan Ekonomis BPBD Kampar Tahun 2020 .....	51
Tabel 4. 13 Perhitungan Efisiensi BPBD Kampar Tahun 2019.....	55
Tabel 4. 14 Perhitungan Efisiensi BPBD Kampar Tahun 2020.....	58
Tabel 4. 15 Perhitungan Efektivitas BPBD Kampar Tahun 2019 .....	61
Tabel 4. 16 Perhitungan Efektivitas BPBD Kampar Tahun 2020 .....	64

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Peran utama pemerintah sebagai organisasi sektor publik yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Terlaksananya pemerintahan yang baik adalah persyaratan bagi setiap pemerintah guna mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai peran utamanya tersebut. Setiap instansi pemerintah tentunya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk merealisasikan tujuannya, nantinya dana anggaran tersebut diharapkan juga sesuai dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sehingga manfaatnya juga dapat dirasakan oleh masyarakat. Sebagaimana didasari oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola dengan tertib, taat pada aturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab serta memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat masyarakat yang dilaksanakan dalam suatu sistem terintegritas yang diwujudkan dalam anggaran.

Melihat banyaknya data kasus korupsi yang dilakukan oleh instansi pemerintah, terutama pemerintah kabupaten yang memiliki kasus tertinggi sebanyak 95 kasus pada tahun 2019 yang dilansir oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW), sehingga perlu adanya transparansi untuk melaporkan kinerja pemerintah agar tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat. Sesuai dengan

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah.

Setelah munculnya Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan secara teknis diatur dalam PERMENPAN-RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Review atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka terjadi perubahan nama Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), maka dari itu untuk penjelasan selanjutnya digunakan istilah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menggambarkan keberhasilan dan kegagalan suatu instansi dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good government*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Oleh karena itu pengukuran kinerja sektor publik sangat diperlukan untuk menilai apakah kinerja instansi pemerintah sudah ekonomis, efektif, dan efisien. Untuk mengukur kinerja lembaga sektor publik ini salah satunya adalah dengan menggunakan metode *value for money*.

*Value For Money* menurut Mardiasmo (2018:5) merupakan suatu konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti

penggunaannya diminimalisir dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif dengan maksud mencapai tujuan dan sasaran.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang bertugas menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang ditujukan untuk masyarakat. Selain itu tugasnya adalah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar memiliki program dan kegiatan disetiap tahunnya. Dilihat dalam laporan realisasi keuangan BPBD Kampar tahun 2019 (Lampiran 1 Halaman 33) program yang mencapai realisasi anggaran tertinggi adalah pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan sebesar 100%. Sedangkan program dengan realisasi anggaran terendah pada tahun 2019 adalah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana sebesar 92,72%.

Dilihat dalam laporan realisasi keuangan BPBD Kampar tahun 2020 (Lampiran 2 Halaman 34) Program yang mencapai realisasi anggaran tertinggi adalah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar 100%. Sedangkan program dengan capaian realisasi terendah Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur sebesar 75,16%.

Sehingga dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 hanya terdapat 1 dari 9 program yang mencapai realisasi anggarannya 100% yaitu pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan dan 8 program lainnya yang tidak mencapai realisasi anggaran penuh yaitu pada

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana, Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, Program Bidang Kedaruratan dan Logistik, Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dan Kesiapsiagaan.

Sedangkan pada tahun 2020 juga hanya terdapat 1 dari 7 program yang mencapai realisasi anggaran > 100% yaitu pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan dan 6 program lainnya yang tidak mencapai realisasi anggaran penuh yaitu pada Program Pelayanan dan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana, Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, Program Bidang Kedaruratan dan Logistik, Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dan Kesiapsiagaan. Maka demikian banyaknya program yang tidak mencapai targetnya tersebut menunjukkan bahwa anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar belum dapat terserap dengan optimal.

Selain itu masih terdapat keluhan dari masyarakat terkait kinerja Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Kabupaten Kampar dalam program berikut:

Tabel 1. 1

## Capaian Fisik Program Bidang Kedaruratan dan Logistik

Tahun 2019			
Program	Kegiatan	Rencana Fisik	Realisasi Fisik
Program Bidang Kedaruratan Dan Logistik	Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB)	100%	100%
Tahun 2020			
Program	Kegiatan	Rencana Fisik	Realisasi Fisik
Program Bidang Kedaruratan dan Logistik	Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB)	100%	100%

Sumber : LKJIP BPBD Kampar Tahun 2019-2020

Dilihat dari tabel 1.1 program ini mencapai capaian fisik 100% yang artinya kegiatan yang dilakukan telah dilaksanakan sesuai rencananya. Namun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar diketahui bahwa dari kegiatan tersebut masih terdapat keluhan dari masyarakat terkait lambatnya respon dari pihak BPBD Kampar dalam melakukan pengendalian penanggulangan bencana yang dilakukan. Hal ini didukung dari peristiwa banjir yang terjadi di kabupaten Kampar pada bulan Desember Tahun 2019 dimana penanganan dan bantuan dari pihak BPBD Kampar sendiri belum tersalurkan di hari ke-7 banjir berlangsung. Selain itu diketahui bahwa kemampuan anggaran dan sumber daya manusia tidak sesuai dengan keinginan masyarakat serta terdapat beberapa bencana yang tidak dapat ditanggulangi sehingga membutuhkan bantuan dari pihak luar, seperti bencana covid-19 dan kebakaran hutan berskala besar.

Dilihat dari beberapa masalah yang telah dikemukakan diatas perlu sekiranya pengukuran kinerja untuk melihat apakah pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah sesuai dengan konsep *value for money* yaitu ekonomis, efektif, dan efisien. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis *Value for Money* Pada Kinerja Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian adalah :

1. Bagaimana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar pada tahun 2019-2020 dengan menggunakan konsep *value for money* yang ditinjau dari segi ekonomis?
2. Bagaimana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar pada tahun 2019-2020 dengan menggunakan konsep *value for money* yang ditinjau dari segi efisiensi?
3. Bagaimana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar pada tahun 2019-2020 dengan menggunakan konsep *value for money* yang ditinjau dari segi efektivitas?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengukur kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar pada tahun 2019-2020 dengan menggunakan konsep *value for money* yang ditinjau dari segi ekonomis.
2. Untuk mengukur kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar pada tahun 2019-2020 dengan menggunakan konsep *value for money* yang ditinjau dari segi efisiensi.
3. Untuk mengukur kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar pada tahun 2019-2020 dengan menggunakan konsep *value for money* yang ditinjau dari segi efektivitas.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini sekiranya dapat berguna bagi penulis sebagai sarana yang tepat dalam menerapkan teori akuntansi dan yang telah didapatkan selama perkuliahan, selain itu juga dapat berbagi ilmu pengetahuan yang berkaitan khusus dengan masalah konsep *value for money*.

2. Bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar

Bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar hasil penelitian ini berguna sebagai perbandingan dari kinerja yang telah dilaksanakan pada periode 2019-2020.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau inspirasi bagi peneliti yang meneliti kasus sejenis.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memiliki tujuan untuk menggambarkan secara garis besar batas dan luasnya penulisan, berikut bagian bab dalam penelitian ini :

#### BAB I

#### PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

#### BAB II

#### TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Pada bab ini berisikan teori atau literatur review yang berkaitan dengan penelitian seperti APBD, Kinerja keuangan, dan Value for Money. Kemudian, berdasarkan telaah pustaka tersebut akan dihasilkan proposisi ( pernyataan-pernyataan hipotetikal) yang biasa dikenal dengan hipotesis. Hipotesis ini lah yang nantinya diuji dalam penelitian ini.

#### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, prosedur penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini.

#### **BAB IV**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini diuraikan gambaran umum penelitian, memaparkan serta menjelaskan hasil penelitian secara logis dan telaah pustaka sesuai dengan topik penelitian.

#### **BAB V**

#### **SIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisi simpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan penelitian serta saran yang berguna sebagai solusi praktis dan teoritis.

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Telaah Pustaka

##### 2.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

###### 2.1.1.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Renyowijoyo (2013:47) mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan bentuk pengendalian keuangan negara yang ditentukan setiap periode dengan peraturan daerah. Hal tersebut mencakup anggaran pendapatan, anggaran belanja, dana perimbangan, dan lain-lain. Belanja dianggarkan sesuai dengan kepentingan organisasi, fungsi dan jenis belanja. Menurut Yuesti, et al. (2020:50) bahwa Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) merupakan daftar yang berisi rincian penerimaan daerah dan pengeluaran atau belanja daerah selama periode anggaran yang ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) selama setahun dari awal tahun hingga akhir tahun. Sedangkan menurut Kurnia (2016:21) bahwa definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah taksiran keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang diabsahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Pasal 27 ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari 3 unsur sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah pendapatan yang diterima dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

## 2. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau deplesi aset atau terjadinya utang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana.

## 3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan atau pengeluaran yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran atau sebagai alokasi surplus anggaran.

### 2.1.1.2 Prinsip Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2015 prinsip penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) antara lain:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya.
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD.
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat.
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan.
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

## 2.1.2 Konsep Kinerja Keuangan

### 2.1.2.1 Pengertian Kinerja dan Pengukuran Kinerja

Pengertian kinerja menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keluaran atau hasil dari program ataupun kegiatan yang akan atau telah tercapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Menurut Sasmita (2021:101) kinerja merupakan sebuah capaian kerja yang dilakukan oleh seseorang, unit kerja, dan atau suatu organisasi pada periode tertentu sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya sebagai bentuk mencapai tujuan secara valid. Menurut Basri (2018:42) kinerja adalah penjabaran terkait tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dan atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan rencana strategis.

Setelah melihat beberapa penjabaran terkait definisi kinerja maka penulis menyimpulkan pengertian dari kinerja adalah suatu gambaran yang mendeskripsikan kondisi keuangan dalam suatu instansi ataupun perusahaan berdasarkan dengan tujuan, sasaran, visi, dan misi yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Solihin (2019:103) pengukuran kinerja merupakan suatu teknik evaluasi yang dilaksanakan secara periodik terhadap kinerja dalam suatu organisasi yang mengakomodasi kesuksesan atau yang terkait dengan praktik tugas serta kewajibannya. Sedangkan menurut menurut Nordiawan dan Hertianti (2010:158) adalah sebuah prosedur yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan

suatu organisasi terhadap apa yang direncanakan serta melihat apakah program yang dijalankan telah sesuai dengan rencananya. Dapat disimpulkan dari pengertian-pengertian yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa pengukuran kinerja adalah sebuah proses untuk mengukur kesuksesan suatu organisasi publik dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### 2.1.2.2 Tujuan Pengukuran Kinerja

Menurut Nordiawan dan Ayuningtyas (2010:158) menyebutkan bahwa tujuan dari pengukuran kinerja di sektor publik adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan organisasi

Dalam hal ini pengukuran kinerja dijadikan sebagai penentu tingkat ketercapaian suatu tujuan dalam sektor publik dan juga menunjukkan apakah terdapat penyimpangan dalam mencapai tujuan tersebut.

2. Sebagai sarana pembelajaran pegawai

Tujuan pengukuran kinerja yang telah disebutkan sebelumnya adalah untuk mengukur sejauh mana tujuan suatu organisasi tercapai. Tujuan yang dicapai tersebut merupakan hasil dari kerja sama pegawai, maka hal ini dapat dijadikan pembelajaran bagi pegawai untuk masa yang akan datang.

3. Sebagai dasar perbaikan periode sebelumnya

Dari hasil kinerja yang dilakukan pada periode sebelumnya tentu bisa dijadikan tolak ukur dalam melakukan perbaikan terhadap kesalahan yang dibuat pada masa sebelumnya, maka dari itu kesalahan-kesalahan tersebut dapat dicegah pada periode yang akan datang.

4. Membantu dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan dan hukuman

Tujuan yang dapat dicapai dan tidak dapat dicapai tentunya akan menjadi pertimbangan bagi pimpinan untuk dapat memutuskan apakah pegawai dapat diberikan penghargaan atau pun hukuman dari hasil kerjanya.

5. Memotivasi pegawai

*Reward* atau penghargaan adalah sebuah hadiah yang diberikan organisasi terhadap pegawainya terhadap hasil kinerja pegawai yang baik. Tentunya tiap individu memiliki tujuan tersendiri didalam organisasi, untuk mendapatkan keuntungan atau penghargaan tersebut pastinya akan memotivasi mereka untuk bekerja dengan baik sesuai dengan tujuan yang dimiliki organisasi.

6. Mewujudkan akuntabilitas publik

Setiap kegiatan atau program yang dilakukan oleh suatu organisasi sektor publik diperlukan adanya pertanggungjawaban kepada masyarakat. Masyarakat sebagai pemberi dana berhak mengetahui pengelolaan keuangan terhadap kegiatan atau program yang dilaksanakan.

### 2.1.2.3 Manfaat Pengukuran Kinerja

Efriyanti, Retno, dan Yunus (2012:301), mengatakan manfaat dari penilaian kinerja keuangan adalah :

1. Menilai pencapaian kesuksesan tiap kegiatan yang telah direncanakan.

2. Untuk mengevaluasi keikutsertaan suatu bagian dalam pencapaian tujuan secara keseluruhan.
3. Dimasa yang akan datang dapat dijadikan sebagai pertimbangan membentuk strategi baru.
4. Dapat membantu dalam membuat suatu keputusan pada suatu organisasi.
5. Dapat dijadikan penentu kebijakan seperti penanaman modal bagi suatu organisasi.

Jika suatu tujuan dapat tercapai tentunya manfaat juga akan dirasakan oleh sutau organisasi sektor publik dalam melaksanakan pengukuran kinerja tersebut.

#### 2.1.2.4 Pengertian Indikator Kinerja

Menurut Nordiawan (2006:267), indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, dengan mempertimbangkan indikator *input*, *output*, *outcome*, *benefits*, dan *impacts*. Nordiawan (2006:267) juga menjelaskan tiap indikator tersebut sebagai berikut :

1. Indikator masukan (*inputs*) merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijaksanaan/peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.

2. Indikator keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau nonfisik.
3. Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
4. Indikator manfaat (*benefits*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil.
5. Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Menurut Basri (2018) bahwa informasi yang dibutuhkan dalam melakukan pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

1. Informasi Finansial

Laporan kinerja finansial penilaiannya diukur berdasarkan pada anggaran yang telah ditentukan sebelumnya. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisa varians (selisih atau perbedaan) antara realisasi kinerja dengan anggaran yang telah ditetapkan. Secara umum analisis varians ini berfokus pada:

- a. Varian Pendapatan (*income variant*)

Varian pendapatan merupakan wujud peningkatan aktiva atau menurunnya kewajiban dari bermacam sumber dalam tahun anggaran tersebut.

b. Varians pengeluaran (*output variant*)

Varian pengeluaran terdiri dari :

1. Varian belanja rutin (*recurrent expenditure variant*), varian ini merupakan suatu anggaran yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya rutin.
2. Varians belanja investasi/modal (*capital expenditure variant*), varian ini merupakan pengeluaran yang biasanya umur manfaatnya lebih dari satu periode anggaran dan akan menambah kekayaan pemerintah, selain itu juga akan menambah anggaran rutin seperti pada biaya operasional dan pemeliharaan.

2. Informasi Nonfinansial

Informasi nonfinansial menambah keyakinan terhadap kualitas pengendalian manajemen. Teknik pengukuran yang komprehensif yang dikembangkan oleh aneka macam organisasi yaitu metode *Balance Scorecard*. *Balanced Scorecard method* ialah pengukuran organisasi berasal aspek finansial juga aspek nonfinansial. *Balance Scorecard* dievaluasi cocok untuk organisasi sektor publik karena tidak hanya berfokus pada aspek kuantitatif (finansial), namun juga aspek kualitatif (non finansial). Hal tersebut sejalur dengan sektor publik yang menempatkan keuntungan bukan hanya untuk ukuran kinerja utama tetapi juga pada pelayanan yang bersifat kualitatif (non keuangan).

### 2.1.3 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

#### 2.1.3.1 Pengertian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Setelah munculnya Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan secara teknis diatur dalam PERMENPAN-RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Review atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka terjadi perubahan nama Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Menurut PERMENPAN No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan dana anggaran. Menurut Nordiawan & Ayuningtya (2010:167) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan pelaporan kinerja suatu instansi pemerintah untuk menginformasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran. Laporan ini menggambarkan keberhasilan maupun kegagalan yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah yang nantinya laporan ini akan dilaporkan setahun sekali kepada pihak yang berkepentingan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana anggaran yang telah ditetapkan.

### 2.1.3.2 Prinsip Penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah

Prinsip penyusunan LKjIP Menurut Nordiawan & Ayuningtya (2010:167) adalah harus disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan. Selain itu juga terdapat prinsip lainnya dibawah ini:

#### 1. Prinsip lingkup pertanggungjawaban

Dalam melaporkan hasil yang dicapai harus seimbang dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab setiap instansi pemerintah serta harus mencakup kemajuan atau kemunduran yang dicapai.

#### 2. Prinsip prioritas

Segala hal yang dilaporkan terkait capaian kinerja harus dapat berguna bagi para pengambil keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk tindakan upaya yang akan dilakukan.

#### 3. Prinsip manfaat

Suatu laporan kinerja instansi pemerintah harus memiliki manfaat yang lebih besar dari biaya penyusunannya, dan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pencapaian kinerja untuk periode selanjutnya.

### 2.1.3.4 Format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Suatu LKjIP harus memiliki manfaat bagi penggunanya, maka dari itu dibutuhkan format yang sesuai dengan kegunaannya , berikut format LKjIP menurut Nordiawan & Ayuningtya (2010:168) :

## BAB II

## PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan gambaran umum tentang instansi.

## **BAB II RENCANA STRATEGIS**

Pada bab ini berisikan gambaran terkait rencana strategis dan rencana kinerja. Selain itu juga berisikan sasaran yang akan diraih serta visi dan misi instansi.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bab ini berisi hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Selain itu juga menyajikan alokasi dana yang telah anggarkan.

## **BAB IV PENUTUP**

Berisikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan atau kegagalan yang dicapai, permasalahan dan kendala instansi, serta strategi pemecahan masalah tersebut.

**LAMPIRAN** Berisikan penjelasan lebih lanjut terkait perhitungan, gambar, serta aspek pendukung pelaporan kinerja yang disampaikan.

### **2.1.4 Value For Money**

#### **2.1.4.1 Pengertian Value For Money**

Menurut Mardiasmo (2018:5) *value for money* merupakan suatu rancangan pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan oleh tiga elemen yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Menurut Nordiawan & Ayuningtya (2010:120) *value for money* merupakan suatu konsep yang menggambarkan informasi kepada kita terkait anggaran (dana) yang dibelanjakan oleh suatu organisasi sektor

publik telah menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakat. Dalam konsep ini terdapat indikator untuk mengukurnya yaitu ekonomi, efisien, dan efektif.

Menurut Halim et al. (2014) dalam Wuwungan et al. (2019:355) *value for money* merupakan konsep untuk mengukur ekonomis, efisiensi, dan efektivitas kinerja program, kegiatan dan organisasi, dimana ekonomis terkait sejauh mana organisasi sektor publik meminimalisir *input resource* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif, efisiensi terkait pencapaian output yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu dan efektivitas tingkat pencapaian hasil program dengan target yang sah. Disimpulkan bahwa pengertian *value for money* ini adalah suatu proses yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi sektor publik dengan melihat ketiga indikator yaitu ekonomis, efisien, dan efektif sebagai dasar perhitungan kinerja keuangan.

#### 2.1.4.2 Indikator *Value For Money*

Indikator pengukuran kinerja dalam konsep *value for money* ada tiga, yaitu:

1. Ekonomis

Menurut Mardiasmo (2018:5) ekonomis merupakan penerimaan masukan (*input*) dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga terendah.

Menurut Basri (2018:48) ekonomis merupakan pelaksanaan pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang memungkinkan (*spending less*).

Berikut merupakan cara mengukur elemen ekonomis Menurut Mahmudi (2010:84):

$$\text{Ekonomis} : \frac{\text{Input}}{\text{Nilai Input}} \times 100\%$$

Keterangan :

Input : Realisasi Anggaran  
 Angka input yang dimaksud adalah angka realisasi anggaran yang dikeluarkan pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar.

Nilai Input : Anggaran  
 Angka nilai input yang dimaksud adalah angka anggaran atau pagu yang ditetapkan sebelumnya pada rancangan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

## 2. Efisiensi

Menurut Mardiasmo (2018:5) efisiensi merupakan pencapaian keluaran (*output*) yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Menurut Basri (2018:48) efisiensi merupakan suatu indikator yang menjelaskan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu organisasi dan keluaran yang dihasilkan oleh indikator tersebut yang memberikan informasi terkait perubahan masukan menjadi keluaran.

Menurut Menurut Mahmudi (2010:85) cara mengukur tingkat efisiensi adalah:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Keterangan:

Output : Persentase Realisasi Fisik

Angka output yang dimaksud adalah persentase realisasi fisik dari program-program yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar.

Input : Persentase Realisasi Keuangan

Angka input yang dimaksud adalah presentase realisasi keuangan yang dikeluarkan untuk melaksanakan program-program dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar.

### 3. Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2018:5) efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara ringkas efektivitas merupakan perbandingan *outcame* dan *output*. Menurut Basri (2018:48) efektivitas adalah suatu indikator yang menjelaskan cakupan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan.

Menurut Mahmudi (2010: 86) cara mengukur tingkat efektivitas adalah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Keterangan:

Outcome : Capaian Kinerja

Angka outcome yang dimaksud adalah capaian kinerja/indikator kinerja yang telah dilaksanakan.

Output : Target Kinerja

Angka output yang dimaksud adalah target kinerja yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar.

#### 2.1.4.3 Manfaat Implementasi Konsep *Value For Money*

*Value for money* akan dapat dicapai apabila suatu organisasi sudah dapat meminimalisir biaya input untuk mencapai output yang optimum dalam bentuk upaya mencapai tujuan organisasi. Seiring dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik terkait pelaporan kinerja keuangan maka kini implementasi *value for money* sudah gencar dilaksanakan. Implementasi konsep *value for money* ini diyakini dapat memperbaiki akuntansi sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik. Manfaat implementasi konsep *value for money* pada organisasi sektor publik menurut Kementerian Keuangan antara lain:

1. Memajukan efektivitas pelayanan publik, maksudnya pelayanan yang diberikan tepat dengan sasaran.
2. Meningkatkan kualitas dalam pelayanan publik.
3. Meminimalisir biaya pelayanan publik kinerja inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input.

4. Alokasi belanja lebih berpusat pada kepentingan publik.
5. Memajukan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik

#### 2.1.4.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1  
Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sri Kurnia (2016)	Deskriptif	Kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang tahun anggaran 2012-2015 dikategorikan ekonomis dan cukup ekonomis, dikarenakan tingkat rasio 80%-90%. Ditinjau dari tingkat efisiensi tahun anggaran 2012-2015 dikategorikan kurang efisien dan tidak efisien, dikarenakan rasio efisiensi antara 90%-100%. Ditinjau dari tingkat efektivitas tahun anggaran 2012 dikategorikan sangat efektif dengan rasio efektivitas lebih dari 100% dan pada tahun anggaran 2013-2015 dikategorikan efektif dengan rasio efektivitas diatas 90%.

2	Nur Zeni Amilia Putri (2020)	Deskriptif Kualitatif	Analisis <i>value for money</i> pada kinerja keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur terhadap program kesehatan masyarakat, program perbaikan gizi masyarakat, dan program kefarmasian, alat kesehatan, dan pengamanan makanan dari tahun 2016 – 2018 dinyatakan sudah ekonomis, efisien, dan kurang efektif.
3	Yosie Dwinanda (2018)	Studi kasus	kinerja Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dari seluruh kegiatan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 menunjukkan kinerja yang ekonomis, cukup efisien dan kurang efektif.
4	Debby Tamara Enre (2020)	Deskriptif	Kinerja Pemerintah Daerah kabupaten Kota Medan selama tahun 2014-2018 belum ekonomis karena memiliki rata-rata rasio ekonomis yaitu 79% dan termasuk dalam kategori kurang ekonomis. Dari segi efisiensi kurang efisien karena memiliki rata-rata rasio efisiensi yaitu 99,71% . dan dari segi efektivitas, rata-rata rasio efektivitas sebesar 82,49% yang mana berada dalam kategori cukup efektif.
5	Fitriyah Ritonga (2021)	Deskriptif kualitatif	Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau pada tahun 2018-2019 di kategorikan ekonomis , efisiensi, dan tidak efektivitas.

6	Felia Putri Arinda (2021)	Kualitatif	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Pada tahun 2018, ada 9 program dan 34 kegiatan yang dilakukan, namun hanya ada 1 dari 34 kegiatan (2,94%) yang memenuhi 3 elemen <i>value for money</i> . Pada tahun 2019, terdapat 10 program dengan 41 kegiatan yang dilakukan, namun hanya ada 2 dari 41 kegiatan (4,88%) yang memenuhi 3 elemen <i>value for money</i>
7	Della Fadilla (2021)	Deskriptif Kualitatif	Kinerja keuangan Dinas Kesehatan Provinsi riau terhadap kinerja utama tahun 2018-2019 adalah ekonomis, kurang efisien, dan efektif. Kinerja keuangan Dinas Kesehatan Provinsi riau terhadap Kinerja Eselon II dan IV tahun 2018-2019 adalah ekonomis, efisien, dan efektif.

## 2.2 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah Pustaka yang telah dijabarkan oleh diatas, maka penulis akan mengemukakan hipotesis yaitu:

Akuntabilitas Kinerja Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar Belum Memenuhi Prinsip *Value For Money*.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini desain penelitian yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif. Teknis penelitian ini dilakukan dengan memperoleh data terlebih dahulu lalu disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis sesuai dengan teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam pengambilan kesimpulan dan saran. Penelitian ini dilakukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar. Peneliti menggunakan metode ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar apakah telah sesuai dengan konsep *value for money* yaitu ekonomis, efisien, dan efektif.

#### 3.2 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar yang beralamat di Jalan H.R Soebrantas Komplek Kantor Bupati Lama, Kabupaten Kampar, Riau.

#### 3.3 Definisi Variabel Penelitian

##### 3.3.1 *Value For Money*

*Value for money* merupakan sebuah metode untuk mengukur suatu organisasi, instansi, atau perusahaan melakukan pengelolaan kinerja keuangan dengan baik dan sesuai dengan ketiga elemen dalam *value for money* yaitu

ekonomis, efektivitas, dan efisiensi. Berikut cara mengukur kinerja keuangan dengan menggunakan metode *value for money* :

### 3.3.1.1 Ekonomis

Menurut Mahmudi (2010:84) cara mengukur tingkat ekonomis adalah:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Input}}{\text{Nilai Input}} \times 100\%$$

Keterangan :

Input : Realisasi Anggaran

Angka input yang dimaksud adalah angka realisasi anggaran yang dikeluarkan pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar.

Nilai Input : Anggaran

Angka nilai input yang dimaksud adalah angka anggaran atau pagu yang ditetapkan sebelumnya pada rancangan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar.

Menurut Mahsun (2013: 186) kriteria penilaian ekonomis adalah sebagai berikut:

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ( $X < 100\%$ ) maka ekonomis.
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ( $X = 100\%$ ) maka ekonomis berimbang atau cukup ekonomis.
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ( $X > 100\%$ ) berarti tidak ekonomis.

### 3.3.1.2 Efisiensi

Efisiensi (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan. Efisiensi menyangkut pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu (Purwiyanti, 2017).

Menurut Menurut Mahmudi (2010:85) cara mengukur tingkat efisiensi adalah:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Keterangan:

Output : Persentase Realisasi Fisik

Angka output yang dimaksud adalah persentase realisasi fisik dari program-program yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar.

Input : Persentase Realisasi Keuangan

Angka input yang dimaksud adalah presentase realisasi keuangan yang dikeluarkan untuk melaksanakan program-program dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar.

Menurut Mahsun (2013: 186) kriteria penilaian efisien adalah sebagai berikut :

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ( $X < 100\%$ ) maka tidak efisien.
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ( $X = 100\%$ ) maka efisiensi berimbang atau cukup efisien.
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ( $X > 100\%$ ) berarti efisien.

### 3.3.1.3 Efektivitas

Efektivitas (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran, efektivitas berkaitan erat terhadap tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Menurut Mahmudi (2010: 86) cara mengukur tingkat efektivitas adalah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Keterangan:

Outcome : Capaian Kinerja

Angka outcome yang dimaksud adalah capaian kinerja/indikator kinerja yang telah dilaksanakan.

Output : Target Kinerja

Angka output yang dimaksud adalah target kinerja yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar.

Menurut Mahsun (2013:187) kriteria efektivitas adalah sebagai berikut:

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ( $X < 100\%$ ) maka tidak efektif.
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ( $X = 100\%$ ) maka efektif berimbang atau cukup efektif.
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ( $X > 100\%$ ) berarti efektif.

### 3.3.2 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah deskripsi yang menjelaskan tentang kondisi keuangan suatu instansi, organisasi ataupun perusahaan terhadap tujuan, standar, dan syarat yang telah ditetapkan sebelumnya.

## 3.4 Jenis dan Sumber Data

### 3.4.1 Jenis data

Dalam penelitian ini jenis data yang peneliti gunakan adalah data kuantitatif berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar Tahun 2019-2020.

### 3.4.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah:

#### 1. Data Primer

Data primer menurut Sugiyono (2019:194) adalah sumber data yang secara langsung diperoleh dari objek yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar Tahun 2019-2020 dan keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang diperoleh dari hasil wawancara.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder menurut Sugiyono (2019:194) adalah sumber data yang tidak diperoleh langsung dari pihak pertama melainkan melalui pihak ketiga. Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, dan literatur review lainnya.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah :

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi dari seorang narasumber dengan cara memberikan beberapa pertanyaan terkait informasi yang dibutuhkan. Dalam wawancara ini peneliti menerima informasi dari Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar.

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan mengumpulkan data dengan cara memperoleh dokumen-dokumen dan juga arsip yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dan nantinya juga akan mengolah dokumen berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar.

### 3.6 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis deskriptif. Tahap pertama yang peneliti lakukan dalam analisa data yaitu melakukan pengukuran kinerja keuangan melalui konsep *value for money* dengan memperhitungkan 3 elemen yang terkait, yaitu elemen ekonomis, efisien, dan efektivitas. Berdasarkan pengukuran ketiga elemen tersebut nantinya peneliti akan

menjelaskan hasil perhitungan dan kemudian akan melakukan analisa dari hasil perhitungan yang telah dilakukan guna melihat apakah kinerja keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar sudah baik atau belum. Data-data yang digunakan untuk menghitung ketiga elemen dari konsep *value for money* ini didapatkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar yang beralamat di jalan Lingkar, Bangkinang merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang bertugas dalam penanggulangan bencana di daerah Kabupaten Kampar dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar memiliki kedudukan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, visi, misi, dan perjanjian kinerja pada tahun 2019-2020 sebagai berikut :

##### 4.1.1 Kedudukan

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar didasari oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66). Selain itu juga didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Laksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar secara ex officio oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar dan bertanggung

jawab langsung kepada Bupati Kampar. Sebagaimana pelimpahan wewenang Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar.

#### 4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar dan Peraturan Bupati Kampar Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktur Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar adalah:

- 4.1.3 Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, efektif, dan efisien.
- 4.1.3 Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana.

5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerahh setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
7. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

#### 4.1.3 Struktur Organisasi

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar dilengkapi dengan struktur organisasi sebagai berikut :

##### 1.1.4 Kepala

- a. Kepala BPBD dijabat secara rangkap (*ex-officio*) oleh sekretaris daerah.
- b. Kepala BPBD membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana penanggulangan bencana.
- c. Kepala BPBD bertanggungjawab langsung kepada kepala daerah.

##### 2.1.4 Unsur pengarah

##### 3.1.4 Unsur pelaksanaan terdiri dari :

- a. Kepala pelaksana
- b. Sekretariat unsur pelaksana, terdiri dari:
  - 1) Sub bagian umum dan kepegawaian
  - 2) Sub bagian perencanaan

- 3) Sub bagian keuangan
- c. Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, terdiri dari :
  - 1) Seksi pencegahan
  - 2) Seksi kesiapsiagaan
- d. Bidang kedaruratan dan logistik, terdiri dari:
  - 1) Seksi kedaruratan
  - 2) Seksi logistik
- e. Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, terdiri dari:
  - 1) Seksi rehabilitasi
  - 2) Seksi rekonstruksi
- f. Satuan tugas
- g. Pusdalops PB
- h. Kelompok jabatan fungsional

Berikut merupakan daftar susunan kepegawaian BPBD, pejabat struktural, jumlah jabatan fungsional umum yang ditugaskan di BPBD pada Tahun 2019-2020:

**Tabel 4. 1**  
**Daftar Susunan Kepegawaian BPBD**  
**Per Desember Tahun 2019**

No	Pangkat/Gol	SD (Org)	SLTP (Org)	SLTA (Org)	Sarmud (Org)	Strata 1 (Org)	Strata 2 (Org)	KET
1	Pembina Utama Muda (IV/C)	-	-	-	-	-	1	
2	Pembina Tingkat I (IV/B)	-	-	-	-	-	-	
3	Pembina (IV/A)	-	-	-	-	1	3	
4	Penata Tingkat I (III/D)	-	-	1	-	7	-	
5	Penata (III/C)	-	-	-	1	5	1	
6	Penata Muda Tingkat I(III/B)	-	-	2	-	-	1	
7	Penata Muda (III/A)	-	-	-	-	2	-	
8	Pengatur Tk. I (II/D)	-	-	1	-	-	-	
9	Pengatur (II/C)	-	-	5	-	-	-	
10	Pengatur Muda Tk. I (II/B)	-	-	2	-	1	-	
11	Pengatur Muda (II/A)	-	-	2	-	-	-	
12	Juru (I/C)	-	1	-	-	-	-	
13	Juru Muda Tk. (I/B)	1	-	-	-	-	-	
14	Juru Muda Tk. (I/A)	2	-	-	-	-	-	
15	Honorar	-	-	13	-	15	-	
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	

Sumber : LKjIP BPBD Kampar Tahun 2019

**Tabel 4. 2**  
**Daftar Susunan Kepegawaian BPBD**  
**Per Desember Tahun 2020**

No	Pangkat/Gol	SD (Org)	SLT P (Org)	SLTA (Org)	Sarmud (Org)	Strata 1 (Org)	Strata 2 (Org)	KET
1	Pembina Utama Muda (IV/C)	-	-	-	-	-	-	
2	Pembina Tingkat I (IV/B)	-	-	-	-	-	-	
3	Pembina (IV/A)	-	-	-	-	3	1	
4	Penata Tingkat I (III/D)	-	-	-	-	5	-	
5	Penata (III/C)	-	-	1	2	3	1	
6	Penata Muda Tingkat I(III/B)	-	-	2	-	2	-	
7	Penata Muda (III/A)	-	2	-	-	5	-	
8	Pengatur Tk. I (II/D)	-	-	3	-	-	-	
9	Pengatur (II/C)	-	-	1	-	-	-	
10	Pengatur Muda Tk. I (II/B)	-	-	1	-	-	-	
11	Pengatur Muda (II/A)	-	-	1	-	-	-	
12	Juru (I/C)	-	2	-	-	-	-	
13	Juru Muda Tk. (I/B)	-	-	-	-	-	-	
14	Juru Muda Tk. (I/A)	1	-	-	-	-	-	
15	Honorar	-	-	29	2	27	-	
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>4</b>	<b>38</b>	<b>2</b>	<b>31</b>	<b>2</b>	

Sumber : LKjIP BPBD Kampar Tahun 2020

**Tabel 4. 3**  
**Pejabat Struktural**  
**Per desember Tahun 2019**

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon II/B	1 Orang
2	Eselon III/A	Orang
3	Eselon III/B	3 Orang
4	Eselon IV/A	9 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>14 Orang</b>

Sumber : LKjIP BPBD Kampar Tahun 2019

**Tabel 4. 4**  
**Pejabat Struktural**  
**Per Desember Tahun 2020**

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon II/B	-
2	Eselon III/A	1 Orang
3	Eselon III/B	3 Orang
4	Eselon IV/A	6 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>10 Orang</b>

Sumber : LKjIP BPBD Kampar Tahun 2020

**Tabel 4. 5**  
**Jumlah Jabatan Fungsional Umum yang ditugaskan BPBD**  
**Per desember Tahun 2019**

No	Uraian	Jumlah
1	Fungsional umum BPBD	30 orang
<b>Jumah</b>		<b>30 orang</b>

Sumber : LKjIP BPBD Kampar Tahun 2019

**Tabel 4. 6**  
**Jumlah Jabatan Fungsional Umum yang ditugaskan**  
**Per Desember Tahun 2020**

No	Uraian	Jumlah
1	Fungsional umum BPBD	21 orang
	<b>Jumah</b>	<b>21 orang</b>

Sumber : LKjIP BPBD Kampar Tahun 2020

#### 4.1.4 Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kampar

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kampar adalah “Tanggap, Tangguh, Terampil dan Tuntas dalam Menanggulangi Bencana”. Untuk mewujudkan visi tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kampar memiliki misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas aparat pemerintah, masyarakat, dunia usaha, sektor swasta, untuk tangguh bencana.
2. Meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
3. Melaksanakan pembinaan dan perlindungan terhadap masyarakat yang terkena dampak bencana.
4. Melaksanakan program rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap dampak bencana.

#### 4.1.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2019-2020

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan wujud nyata komitmen antara kepala Badan dengan Bupati sebagai pemberi amanah untuk

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Perjanjian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kampar yang telah ditandatangani pada Desember 2019 sebagai berikut:

**Tabel 4. 7**

**Perjanjian Indikator Kinerja BPBD Kampar Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Kelancaran Operasional Pelayanan Administrasi Perkantoran	penyelenggaraan administrasi perkantoran berjalan cepat, tertib, lancar sesuai dengan aturan yang berlaku, tersedianya buku-buku UU kebencanaan, peraturan-peraturan dan majalah kebencanaan untuk dijadikan referensi bagi pegawai BPBD	100%
		terpenuhi pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-
		terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	-
		terpenuhinya kebutuhan pengadaan barang dan jasa bagi petugas aparatur	100%
2	Memudahkan Sarana Dan Prasarana Operasional	terpenuhinya sarana dan prasarana operasional	100%
		lancarnya aktivitas pekerjaan sehari-hari	-
3	Kenyamanan Dalam Melakukan Aktivitas Sehari-Hari	terselenggaranya transportasi penanggulangan bencana	-
4	Meningkatnya SDM Yang Memahami Penatausahaan Keuangan Dan Aset Daerah	tercapainya bimbingan teknis penatausahaan keuangan dan aset	-

5	Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Yang Akuntabel	laporan yang transparan memudahkan dalam kemajuan pekerjaan	100%
6	Memudahkan Perencanaan, System Money Dan Evaluasi	meningkatnya kualitas pengendalian, evaluasi dan pelaporan	100%
7	Meningkatkan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan	terselenggaranya pendamping dan pembinaan bagi desa tangguh bencana	-
8	Pengawasan Teknis Perbaikan Sarana Dan Prasarana Umum	terselenggaranya pengawasan teknis perbaikan sarana dan prasarana umum	95%
9	Perbaikan Sarana Dan Prasarana Umum Pasca Bencana	terselenggaranya perbaikan sarana dan prasarana	-
10	Pengendalian Dan Koordinasi Perbaikan Sarana Dan Prasarana Umum Pasca Bencana	terselenggaranya pengendalian dan koordinasi perbaikan sarana dan prasarana umum pasca bencana	-
11	Mengembangkan Kemampuan Masyarakat Dan Satgas PB	meningkatnya kemampuan masyarakat dalam berimprovisasi menghadapi bahaya bencana	100%
12	Meningkatkan Kemampuan Dan Ketrampilan Penanggulangan Bencana	-	-
13	Mengembangkan Kemampuan Satgas PRB	-	-

Sumber : LKjIP BPBD Kampar Tahun 2019

Tabel 4. 8

## Perjanjian Indikator Kinerja BPBD Kampar Tahun 2020

no	sasaran Strategis	indikator kinerja	target
1	terwujudnya kelancaran operasional pelayanan administrasi perkantoran	penyelenggaraan administrasi perkantoran berjalan cepat, tertib, lancar sesuai dengan aturan yang berlaku, tersedianya buku-buku UU kebencanaan, peraturan-peraturan dan majalah kebencanaan untuk dijadikan referensi bagi pegawai BPBD	100%
		terpenuhi pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-
		terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	-
		terpenuhinya kebutuhan pengadaan barang dan jasa bagi petugas aparatur	100%
2	memudahkan sarana dan prasarana operasional	terpenuhinya sarana dan prasarana operasional	100%
		lancarnya aktivitas pekerjaan sehari-hari	-
3	kenyamanan dalam melakukan aktivitas sehari-hari	terselenggaranya transportasi penanggulangan bencana	-
4	pelaporan keuangan akhir tahun yang akuntabel	laporan yang transparan memudahkan dalam kemajuan pekerjaan	100%
5	memudahkan perencanaan, system monev dan evaluasi	meningkatnya kualitas pengendalian, evaluasi dan pelaporan	100%
6	meningkatkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	terselenggaranya pendamping dan pembinaan bagi desa tangguh bencana	-
7	pengawasan teknis perbaikan sarana dan prasarana umum	terselenggaranya pengawasan teknis perbaikan sarana dan prasarana umum	95%

8	perbaikan sarana dan prasarana umum pasca bencana	terselenggaranya perbaikan sarana dan prasarana	-
9	pengendalian dan koordinasi perbaikan sarana dan prasarana umum pasca bencana	terselenggaranya pengendalian dan koordinasi perbaikan sarana dan prasarana umum pasca bencana	-
10	mengembangkan kemampuan masyarakat dan satgas PB	meningkatnya kemampuan masyarakat dalam berimprovisasi menghadapi bahaya bencana	100%
11	meningkatkan kemampuan dan ketrampilan penanggulangan bencana	-	-
12	mengembangkan kemampuan satgas PRB	-	-

Sumber : LKjIP BPBD Kampar Tahun 2020

Tabel 4. 9

**Perjanjian Program BPBD Kampar Tahun 2019**

No	Kegiatan	Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 2.384.882.741
2	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 372.780.800
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 229.680.000
4	Program peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Rp 19.500.000
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Rp 2.730.000
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Rp 235.751.166

7	Program Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Rp 1.429.177.650
8	Program Bidang Kedaruratan dan Logistik	Rp 533.440.550
9	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dan Kesiapsiagaan	Rp 206.869.555

Sumber : LKjIP BPBD Kampar Tahun 2019

**Tabel 4. 10**

**Perjanjian Program BPBD Kampar Tahun 2020**

No	Kegiatan	Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp1.288.467.172
2	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 297.610.600
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 2.730.000
4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan	Rp 178.495.894
5	Program Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Rp1.972.512.250
6	Program Bidang Kedaruratan dan Logistik	Rp 812.703.990
7	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dan Kesiapsiagaan	Rp 140.035.225

Sumber : LKjIP BPBD Kampar tahun 2020

#### 4. 2 Hasil Penelitian

Pada pembahasan ini akan dilakukan perhitungan terkait bagaimanakah tingkat elemen *value for money* yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIp) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar periode 2019-2020 guna mengetahui

bagaimana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar. Berikut merupakan hasil penelitian terkait perhitungan masing-masing elemen *value for money*:

#### 4.2.1 Ekonomis

Mengukur rasio ekonomis berarti mengukur seberapa penghematan dari pengeluaran yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah. Pengukuran rasio ekonomi memerlukan data anggaran dan realisasi anggarannya. Untuk mengukur rasio ekonomis dilakukan perhitungan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Ekonomis} : \frac{\text{Input}}{\text{Nilai Input}} \times 100\%$$

Keterangan:

Input : Realisasi Anggaran

Angka input yang dimaksud adalah angka realisasi anggaran yang dikeluarkan pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar.

Nilai Input : Anggaran

Angka nilai input yang dimaksud adalah angka anggaran atau pagu yang ditetapkan sebelumnya pada rancangan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar.

Berikut merupakan perhitungan rasio ekonomis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar periode 2019-2020.

**Tabel 4. 11**  
**Perhitungan Ekonomis**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar**  
**Tahun 2019**

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyedia Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	42.000.000	32.685.325	77,82%
	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	455.258.064	448.693.182	98,56%
	Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	85.000.000	84.278.000	99,15%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	57.739.017	57.655.017	99,85%
	Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan	48.844.800	48.723.333	99,75%
	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.940.000	27.740.000	99,28%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	408.291.860	406.969.360	99,68%

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.784.000	19.284.000	97,47%
	Penyediaan Makanan dan Minuman	71.350.000	71.245.000	99,85%
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	877.742.000	808.574.048	92,12%
	Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	59.733.000	57.195.000	95,75%
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam daerah	231.200.000	199.830.000	86,43%
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	53.000.000	51.600.000	97,36%
	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	59.400.000	59.280.600	99,80%
	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/Operasional	260.380.800	251.408.825	96,55%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	229.680.000	229.538.500	99,94%
Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	19.500.000	19.184.660	98,38%

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2.730.000	2.730.000	100,00%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	117.637.116	105.277.116	89,49%
	Forum Pertemuan Dalam Rangka Siaga Bencana KARHUTLA	118.114.050	113.314.050	95,94%
Program Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Pendataan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana	361.867.000	348.609.600	96,34%
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana	1.067.310.650	1.060.946.675	99,40%
Program Bidang Kedaruratan dan Logistik	Peningkatan Kapasitas tanggap Darurat	176.381.500	171.342.432	97,14%
	Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB)	357.059.050	355.259.050	99,50%
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dan Kesiapsiagaan	Penyuluhan Budaya Sadar Bencana pada Kecamatan Rawan Bencana	56.489.050	54.989.050	97,34%
	Pengurangan Resiko Bencana Dengan Pengembangan Kearifan Lokal	150.380.505	146.466.105	97,40%

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	(lokal wisdom)			
<b>Ekonomis</b>		<b>5.414.812.462</b>	<b>5.232.818.928</b>	<b>96,64%</b>

Sumber : data olahan (2021)

Berdasarkan Tabel 4.11 diketahui bahwa perhitungan rasio ekonomi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar tahun 2019 adalah sebesar 96,64% dengan perhitungan terkecil sebesar 77,82% pada kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dan perhitungan terbesar adalah sebesar 100% pada kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun .

Peneliti juga melakukan perhitungan ekonomis pada program atau kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar pada tahun 2020. Berikut perhitungan ekonomi program/kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2020.

**Tabel 4. 12**

**Perhitungan Ekonomis**

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar**

**Tahun 2020**

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyedia Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	53.802.000	45.843.647	85,21%

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	penyedia Jasa Kebersihan Kantor	288.579.074	277.679.074	96,22%
	Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	65.000.000	64.924.500	99,88%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	62.411.998	62.411.781	100,00%
	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	15.704.300	15.704.300	100,00%
	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.600.000	12.960.000	69,68%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.000.000	27.400.000	63,72%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.784.000	8.892.000	44,95%
	Penyediaan Makanan dan Minuman	50.793.000	29.830.000	58,73%
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	163.682.800	147.824.100	90,31%
	Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	263.910.000	255.605.000	96,85%
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam daerah	243.200.000	137.790.000	56,66%
Program Peningkatan sarana dan	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	15.000.000	15.000.000	100,00%

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/Operasional	282.610.600	208.685.189	73,84%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2.730.000	2.730.000	100,00%
Program Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Pelaksanaan Tim Gugus Tugas Penanggulangan Corona Virus Disease 2019	-	-	-
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	109.414.844	105.454.844	96,38%
	Forum Pertemuan Dalam Rangka Siaga Bencana KARHUTLA	69.081.050	33.021.050	47,80%
Program Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Pendataan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana	94.850.000	92.400.000	97,42%
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana	1.877.662.250	1.858.028.750	98,95%
Program Bidang Kedaruratan dan Logistik	Peningkatan Kapasitas Tanggap Darurat	60.699.940	19.882.440	32,76%
	Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana(PUSD ALOPS-PB)	752.004.050	752.004.050	100,00%

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dan Kesiapsiagaan	Penyuluhan Budaya Sadar Bencana pada Kecamatan Rawan Bencana	140.035.225	116.742.525	83,37%
<b>Ekonomis</b>		<b>4.692.555.131</b>	<b>4.290.813.250</b>	<b>91,44%</b>

Sumber : data olahan (2021)

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat diketahui bahwa perhitungan ekonomi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar tahun 2020 adalah sebesar 91,44% dengan perhitungan persentase terkecil sebesar 32,76% pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Tanggap Darurat dan perhitungan persentase terbesar adalah sebesar 100% pada kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan, Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor, Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, dan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB).

#### 4.2.2 Efisiensi

Mengukur rasio efisiensi berarti mengukur tingkat input terhadap output yang dihasilkan oleh suatu instansi pemerintah. Dalam pengukuran rasio efisiensi memerlukan data capaian fisik program dan persentase keuangan program. Untuk mengukur tingkat efisiensi dilakukan perhitungan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Keterangan:

Output : Persentase Realisasi Fisik

Angka output yang dimaksud adalah persentase realisasi fisik dari program-program yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar.

Input : Persentase Realisasi Keuangan

Angka input yang dimaksud adalah realiasi keuangan yang dikeluarkan untuk melaksanakan program-program dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar.

Berikut merupakan perhitungan rasio ekonomis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar periode 2019-2020.

**Tabel 4. 13**

**Perhitungan Efisiensi**

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar  
Tahun 2019**

Program	Kegiatan	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyedia Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100,00%	77,82%	128,50%
	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	100,00%	98,56%	101,46%
	Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan	100,00%	99,15%	100,86%

Program	Kegiatan	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	%
	Kerja			
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100,00%	99,85%	100,15%
	Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan	100,00%	99,75%	100,25%
	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100,00%	99,28%	100,72%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,00%	99,68%	100,32%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100,00%	97,47%	102,59%
	Penyediaan Makanan dan Minuman	100,00%	99,85%	100,15%
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	100,00%	92,12%	108,55%
	Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	100,00%	95,75%	104,44%
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam daerah	100,00%	86,43%	115,70%
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	100,00%	97,36%	102,71%
	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	100,00%	99,80%	100,20%
	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/Operasional	100,00%	96,55%	103,57%

Program	Kegiatan	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	100,00%	99,94%	100,06%
Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	100,00%	98,38%	101,65%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Caopaian Kinerja dan keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	100,00%	100,00%	100,00%
Program Perencanaan	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	100,00%	89,49%	111,74%
Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Forum Pertemuan Dalam Rangka Siaga Bencana KARHUTLA	100,00%	95,94%	104,24%
Program Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Pendataan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana	100,00%	96,34%	103,80%
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana	100,00%	99,40%	100,60%
Program Bidang Kedaruratan dan Logistik	Peningkatan Kapasitas tanggap Darurat	100,00%	97,14%	102,94%
	Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB)	100,00%	99,50%	100,51%
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana	Penyuluhan Budaya Sadar Bencana pada Kecamatan Rawan Bencana	100,00%	97,34%	102,73%

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Program	Kegiatan	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	%
Alam dan Kesiapsiagaan	Pengurangan Resiko Bencana Dengan Pengembangan Kearifan Lokal (lokal wisdom)	100,00%	97,40%	102,67%
<b>Efisiensi</b>		<b>100,00%</b>	<b>96,64%</b>	<b>103,48%</b>

Sumber : data olahan (2021)

Berdasarkan tabel 4.13 dapat diketahui bahwa perhitungan efisiensi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar tahun 2019 adalah sebesar 103,48% dengan perhitungan persentase terkecil sebesar 100,00% pada kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dan perhitungan persentase terbesar sebesar 128,50% pada kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik .

Peneliti juga melakukan perhitungan efisiensi pada program/kegiatan tahun 2020. Berikut merupakan perhitungan efisiensi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar Tahun 2020.

**Tabel 4. 14**  
**Perhitungan Efisiensi**

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar**  
**Tahun 2020**

Program	Kegiatan	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	%
Program Pelayanan Administrasi	Penyedia Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100,00%	85,21%	117,36%

Program	Kegiatan	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	%
Perkantoran	penyedia Jasa Kebersihan Kantor	100,00%	96,22%	103,93%
	Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	100,00%	99,88%	100,12%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100,00%	100,00%	100,00%
	Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan	100,00%	100,00%	100,00%
	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	96,00%	69,68%	137,78%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,00%	63,72%	156,93%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100,00%	44,95%	222,49%
	Penyediaan Makanan dan Minuman	100,00%	58,73%	170,27%
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	100,00%	90,31%	110,73%
	Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	100,00%	96,85%	103,25%
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam daerah	100,00%	56,66%	176,50%
Program Peningkatan sarana dan	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	100,00%	100,00%	100,00%

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Program	Kegiatan	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	%
Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/Operasional	97,00%	73,84%	131,36%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	100,00%	100,00%	100,00%
Program Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Pelaksanaan Tim Gugus Tugas Penanggulangan Corona Virus Disease 2019	-	-	-
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	100,00%	96,38%	103,76%
	Forum Pertemuan Dalam Rangka Siaga Bencana KARHUTLA	97,00%	47,80%	202,93%
Program Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Pendataan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana	100,00%	97,42%	102,65%
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana	100,00%	98,95%	101,06%
Program Bidang Kedaruratan dan Logistik	Peningkatan Kapasitas Tanggap Darurat	97,00%	32,76%	296,14%
	pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB)	100,00%	100,00%	100,00%

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Program	Kegiatan	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	%
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dan Kesiapsiagaan	Penyuluhan Budaya Sadar Bencana pada Kecamatan Rawan Bencana	100,00%	83,37%	119,95%
<b>Efisiensi</b>		<b>95,09%</b>	<b>91,44%</b>	<b>103,99%</b>

Sumber : data olahan (2021)

Berdasarkan tabel 4.14 dapat diketahui bahwa perhitungan efisiensi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar tahun 2020 adalah sebesar 103,99% dengan perhitungan persentase terkecil sebesar 100,00% pada kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, Penyedia Barang Cetak dan Pengandaan, Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor, Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, dan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) sedangkan perhitungan persentase terbesar sebesar 296,14% pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Tanggap Darurat.

#### 4.2.3 Efektivitas

Mengukur rasio efektivitas berarti mengukur tingkat output terhadap outcome yang dihasilkan oleh suatu instansi pemerintah. Dalam pengukuran rasio efektivitas ini memerlukan data capaian sasaran dan target sasaran yang dilaksanakan. Untuk mengukur tingkat efektivitas dilakukan perhitungan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Keterangan:

Outcome : Capaian Kinerja

Angka outcome yang dimaksud adalah capaian kinerja yang telah dilaksanakan.

Output : Target Kinerja

Angka output yang dimaksud adalah target kinerja yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar.

Berikut merupakan perhitungan rasio efektivitas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar periode 2019-2020.

**Tabel 4. 15**

**Perhitungan Efektivitas**

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar**

**Tahun 2019**

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja	%
Terciptanya SDM, Sarana, dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Persentase Petugas Penanggulangan Bencana yang Mempunyai skill	30,00%	30,00%	100,00%
	Persentase Kegiatan yang Dapat Dilaksanakan	100,00%	96,64%	96,64%

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja	%
	Persentase Infrastruktur yang Tertangani Akibat Bencana	6 keg	6 keg	100,00%
	Jenis data yang dimiliki	2 jenis	2 jenis	100,00%
Terkoordinasinya Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana	Persentase Daerah Rawan Bencana	50,00%	50,00%	100,00%
Terlaksananya dan terintegrasinya Penanggulangan Tanggab Bencana dengan Meningkatnya Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana serta Penanganan Pengungsi yang Optimal	Persentase data Daerah Rawan Korban Bencana	25,00%	25,00%	100,00%
Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dengan Meningkatnya Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Melalui Perencanaan	Persentase Insfrastruktur yang di Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	100,00%	100,00%	100,00%
<b>Efektivitas</b>				<b>99,52%</b>

Sumber : data olahan (2021)

Berdasarkan tabel 4.15 dapat diketahui bahwa perhitungan efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar tahun 2019 adalah sebesar 99,52% dengan perhitungan persentase terkecil sebesar 96,64% pada indikator kinerja Persentase Kegiatan yang Dapat Dilaksanakan dan perhitungan persentase terbesar sebesar 100% pada indikator kinerja Persentase Petugas Penanggulangan Bencana yang Mempunyai skill, Persentase Infrastruktur yang Tertangani Akibat Bencana, Jenis data yang dimiliki, Persentase Daerah Rawan Bencana, Persentase data Daerah Rawan Korban Bencana, serta Persentase Insfrastruktur yang di Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Peneliti juga melakukan perhitungan efektivitas pada program/kegiatan Tahun 2020. Berikut perhitungan efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar Tahun 2020.

**Tabel 4. 16**

**Perhitungan Efektivitas**

**Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Kabupaaten Kampar**

**Tahun 2020**

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja	%
Terciptanya SDM, Sarana, dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Persentase Petugas Penanggulangan Bencana yang Mempunyai skill	100,00%	80,00%	80,00%
	Persentase Kegiatan yang Dapat Dilaksanakan	100,00%	88,04%	88,04%

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja	%
	Persentase Infrastruktur yang Tertangani Akibat Bencana	11 keg	11 keg	100,00%
	Jenis data yang dimiliki	2 jenis	2 jenis	100,00%
Terkoordinasinya Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana	Persentase Daerah Rawan Bencana	100,00%	70,00%	70,00%
Terlaksananya dan terintegrasinya Penanggulangan Tanggab Bencana dengan Meningkatnya Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana serta Penanganan Pengungsi yang Optimal	Persentase data Daerah Rawan Korban Bencana	100,00%	85,00%	85,00%
Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dengan Meningkatnya Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Melalui Perencanaan	Persentase Insfrastruktur yang di Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	100,00%	100,00%	100,00%
<b>Efektivitas</b>				<b>89,01%</b>

Sumber : data olahan (2021)

Berdasarkan tabel 4.16 dapat diketahui bahwa perhitungan efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar tahun 2020 adalah sebesar 89,01% dengan perhitungan persentase terkecil sebesar 70,00% pada indikator kinerja Persentase Daerah Rawan Bencana dan perhitungan persentase terbesar sebesar 100% pada indikator kinerja Persentase Infrastruktur yang Tertangani Akibat Bencana, Jenis data yang dimiliki, dan Persentase Infrastruktur yang di Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Rekonstruksi Pasca Bencana .

#### **4.3 Pembahasan Hasil Penelitian**

Pada bagian pembahasan ini akan menjelaskan maksud dari hasil penelitian terkait perhitungan masing-masing elemen *value for money*. Berikut merupakan pembahasan dari hasil perhitungan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar berdasarkan elemen *value for money*:

##### **4.3.1 Ekonomis**

Pada Tahun 2019 perhitungan ekonomis pada seluruh program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar adalah sebesar 96,44% sedangkan pada tahun 2020 hasil perhitungan ekonomis adalah sebesar 91,44%. Berdasarkan kriteria penilaian ekonomis yang telah ditetapkan maka pada tahun 2019 dan tahun 2020 program atau kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar dinyatakan ekonomis. Hasil perhitungan rasio ekonomis menunjukkan pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan

sebesar 5,2%. Meskipun terjadi penurunan namun jika dinilai dari segi ekonomis hal ini berarti bahwa pada tahun 2020 telah terjadi penghematan anggaran sebesar 5,2% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Suatu program atau kegiatan yang telah dilaksanakan akan dikatakan ekonomis apabila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Dengan asumsi jika realisasi anggaran untuk tiap pelaksanaan program atau kegiatan yang dijabarkan oleh suatu instansi pemerintah lebih besar dari pada anggaran yang telah ditetapkan maka rasio ekonomis akan semakin besar dan begitu juga sebaliknya.

Dalam perhitungan ekonomis ini menunjukkan bahwa kinerja Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar Tahun 2019 dan 2020 adalah baik karena telah sesuai dengan konsep ekonomis yaitu penghemataan anggaran dalam melaksanakan program atau kegiatan suatu organisasi ataupun instansi. Persentase ekonomis dibawah 100% berarti Badan Penanggulangan bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar telah mengeluarkan dana kurang dari anggaran yang telah ditetapkan.

#### 4.3.2 Efisiensi

Pada Tahun 2019 perhitungan efisiensi pada seluruh program/ kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar adalah sebesar 103,48%. Berdasarkan kriteria penilaian efisiensi yang telah ditetapkan maka pada tahun 2019 program atau kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar dinyatakan efisien. Hal serupa juga terjadi pada tahun 2020 dengan

perhitungan efisiensi pada seluruh program/ kegiatan yang dilakukan adalah sebesar 133,99% sehingga dapat dikategorikan efisiensi menurut kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Hasil perhitungan rasio efisiensi menunjukkan bahwa dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,51% hal ini berarti bahwa pada tahun 2020 BPBD Kampar mampu menghemat dana untuk mendapatkan output yang maksimal dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Suatu program atau kegiatan yang telah dilaksanakan akan dikatakan efisien apabila output yang dihasilkan lebih besar dari penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Dengan asumsi apabila realisasi fisik yang telah dicapai oleh suatu instansi lebih besar dari pada realisasi keuangan yang ditetapkan maka rasio efisiensi yang dihasilkan akan semakin besar.

Dalam perhitungan efisiensi pada tahun 2019 dan 2020 kinerja BPBD Kampar adalah baik karena telah memenuhi konsep efisien yaitu menghasilkan output yang maksimal dengan input yang lebih rendah. Persentase efisiensi lebih dari 100% menunjukkan bahwa persentase fisik program/kegiatan yang telah dilaksanakan melebihi persentase keuangan yang dikeluarkan untuk pelaksanaannya.

#### **4.3.3 Efektivitas**

Pada Tahun 2019 perhitungan efektivitas pada seluruh program/ kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar adalah sebesar 99,52%. Berdasarkan kriteria penilaian efektivitas yang telah ditetapkan maka pada tahun 2019 program atau kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten

Kampar dinyatakan tidak efektif. Hal serupa pun terjadi pada tahun 2020 dimana perhitungan rasio efektivitas adalah sebesar 89,01% dengan kriteria penilaian dinyatakan tidak efektivitas. Hasil perhitungan rasio efektivitas ini menunjukkan bahwa dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 10,51% yang berarti bahwa BPBD Kampar mengalami penurunan kinerja dalam mencapai target sasaran yang telah ditentukan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Suatu program atau kegiatan yang telah dilaksanakan akan dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut telah mencapai tujuan dari sasaran akhir yang ditetapkan. Dengan asumsi bila capaian kinerja yang dicapai lebih besar dari yang ditargetkan maka rasio efektivitas yang dihasilkan juga akan semakin besar dan begitu juga sebaliknya.

Dalam perhitungan efektivitas pada tahun 2019 dan 2020 kinerja Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Kabupaten Kampar adalah kurang baik karena belum memenuhi kategori efektivitas yaitu pencapaian target atas program/kegiatan yang dilaksanakan. Perlu diketahui bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar ini merupakan organisasi sektor publik yang memiliki tujuan untuk memberikan manfaat(benefits) kepada masyarakat bukan untuk mencari laba (profit), maka dari itu untuk menilai suatu efektivitas perlu dilihat apakah manfaat tersebut juga sudah dapat dirasakan oleh masyarakat.

Capaian efektivitas dibawah 100% menunjukkan bahwa realisasi hasil/keluaran yang dilakukan tidak mencapai ekspektasi hasil/keluaran yang

diharapkan oleh instansi. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar bahwa diketahui masih terdapat keluhan dari masyarakat terkait lambatnya respon dari pihak BPBD Kampar dalam melakukan pengendalian penanggulangan bencana yang dilakukan. Hal ini didukung dari peristiwa banjir yang terjadi di kabupaten Kampar pada bulan Desember Tahun 2019 dimana penanganan dan bantuan dari pihak BPBD Kampar sendiri belum tersalurkan di hari ke-7 banjir berlangsung.

Dapat dilihat dari perhitungan ketiga elemen *value for money* diatas bahwa kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar pada tahun 2019 dan tahun 2020 belum memenuhi prinsip *value for money*.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Pada simpulan ini berisikan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian. Berdasarkan hasil perhitungan dalam penelitian ini maka dinyatakan bahwa kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar belum memenuhi prinsip *value for money* sebagaimana penjabarannya adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2019 dan 2020 program/kegiatan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar dikategorikan ekonomis dengan rasio ekonomis sebesar 96,64% dan 91,44%.
2. Pada tahun 2019 dan 2020 program/kegiatan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar dikategorikan efisien dengan rasio efisiensi sebesar 103,48% dan 103,99%.
3. Pada tahun 2019 dan 2020 sasaran strategis yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar dikategorikan tidak efektif dengan rasio efektivitas sebesar 99,52% dan 89,01%.

#### 5.2 Saran

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar diharapkan dapat mengoptimalkan kinerjanya dalam memenuhi elemen *value for money* sehingga akuntabilitas kinerjanya juga dapat tercapai dengan baik. Selain itu juga diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan wawancara ataupun menyebarkan kuisioner kepada masyarakat terkait dampak yang dirasakan masyarakat atas kinerja instansi yang bersangkutan guna mengetahui

pencapaian outcome yang telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah sehingga hasil yang didapatkan dapat lebih akurat. Kemudian, untuk menilai kinerja instansi pemerintah dapat menambahkan elemen lain seperti elemen keadilan (*equity*) dan pemerataan atau kesetaraan (*equality*).



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Y. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Jurusan Akuntansi FE UR.
- Databooks, K. D. (n.d.). *10 Lembaga dengan Temuan Kasus Korupsi Terbanyak*. Retrieved October 15, 2021, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/19/10-lembaga-dengan-temuan-kasus-korupsi-terbanyak> ( Diakses Oktober 15,2021)
- Dwinanda, Y. (2018). *Anallisis Value for Money dalam Pengukuran Kinerja Pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta*. Yogyakarta.
- Efriyanti, F., Retno, A., & Yunus, F. (2012). *Analisis Kinerja Keuangan Sebagai Dasar Investor Dalam Menanamkan Modal Pada PT. Bukit Asam, TBK*. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 3(2), 299–316.
- Enre, D. T. (2020). *Analisis Value for Money Pada Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan (Periode 2014-2019)*. Medan, Sumatera Utara, Indonesia.
- Fadilla, Della. (2021). *Analisis Value for Money pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah (LAKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Riau*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Riau.
- Kurnia, S. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Value For Money Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palembang*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. STIE YKPN, Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. BPFE, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta:Andi.
- Nordiawan, D., & Ayuningtyas, H. (2010). *Akuntansi sektor Publik* (2nd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Nordiawan, D. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta:Salemba Empat.
- Putri, Felia Arinda. (2021). *Analisis Value for Money Pada Kinerja Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Riau.

- Putri, N. Z. A. (2020). *Analisis Value for Money Pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Renyowijoyo, Muindro (2013). *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Nirlaba*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Prinsip Penyusunan APBD.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “ Value for Money” :<https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/21-18/pjpk/persyaratan-proyek/value-for-money-vfm> (Diakses Oktober 19, 2021).
- Ritonga, Fitriyah. (2021). *Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Provinsi Riau*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Riau.
- Sasmita, Djenni. (2021). *Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Kab. Oki Sumatera Selatan Periode 2017-2019*. *Journal of Accounting Science and Technology*, 1(1), 98-110.
- Solihin, D. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Value For Money Pada Politeknik TEDC Bandung. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 13(2), 102–107.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Trilaksono, B. A., & Handayani, N. (2020, 10). *Analisis Value For Money Dan Akuntabilitas Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1-15.
- Wuwungan, G. T., Jantje Tinangon, & Sintje Rondonuwu. (2019). Penerapan Metode Value For Money Sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja Keuangan Pada Organisasi Sektor Publik Di Dinas Kesehatan Kota Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(4), 354–361.
- Yuesti, A., Ni Luh Putu Sandrya Dewi, & I Gusti Ayu Asri Pramesti. (2020). *Akuntansi Sektor Publik*. Bali: CV. Noah Aletheia.